POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/politeia

Dominasi Politik Identitas dalam Kontestasi Politik Indonesia dan Mitigasinya Jelang Pemilu 2024

Pujangga Candrawijayaning Fajri[*1]
[12]*State Islamic University of Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 55281, Indonesia*
[*]Corresponding Author: pujanggacandra11@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 13 November 2023
Revised 30 June 2024
Accepted 26 July 2024
Available online 30 July 2024

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:
Fajri, P, C. (2024). Dominasi Politik Identitas dalam Kontestasi Politik Indonesia dan Mitigasinya Jelang Pemilu 2024. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 16 (2), 66-73.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle

ABSTRACT

The political practice of identity in a political reality is indeed a matter of discretion, given that identity itself is inherent to man. Practices of identity politics potentially have two significant impacts: positive and negative. This study seeks to look at the political impact of identity on some of Indonesia's political contestation experiences and provide constructive advice to mitigate something similar in the forthcoming 2024 elections. This research is qualitative and is accompanied by descriptive techniques of analysis by studying reference sources relevant to the research. The results of this study show that in the context of political controversy in Indonesia, identity politics has been shaped throughout the electoral momentum: Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2019, and Pilpres 2019 were used as political strategies by hitting the identities of other candidates. The emergence of mainstream groups using religious symbols and provocative narratives as an attempt to catch the hearts of voters means that the course of electoral momentum tends to advance sentiment rather than argument. If identity politics continues to flourish, it will potentially give rise to fascism, separatism, and so on. To prevent the same from happening in the forthcoming 2024 elections, it would require mitigation efforts such as strengthening religious moderation, promoting political ethics and ideas of candidates, and increasing digital literacy for voters, so that the niche will create quality electoral processes and outcomes..

Keyword: Identity politics; Indonesian politics; Mitigation; 2024 elections

ABSTRAK

Praktik politik identitas dalam suatu realitas politik memanglah sebuah keniscayaan, mengingat identitas sendiri merupakan hal yang melekat pada manusia. Praktik dari politik identitas berpotensi menimbulkan dua dampak signifikan: yakni dampak positif dan negatif. Penelitian ini berupaya melihat dampak politik identitas pada beberapa pengalaman kontestasi politk Indonesia dan memberikan saran konstruktif guna memitigasi hal yang serupa pada Pemilu 2024 mendatang. Penelitian ini bersifat kualitatif yang disertai dengan teknik deskriptif analisis dengan mengkaji sumber rujukan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam konteks kontestasi politik di Indonesia, politik identitas gencar digaungkan sepanjang momentum-momentum pemilihan: Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2019, dan Pilpres 2019 digunakan sebagai strategi politik dengan menghantam identitas kandidat lain. Munculnya kelompok-kelompok *mainstream* menggunakan simbol-simbol agama dan narasi-narasi provokatif sebagai upaya untuk meraih hati pemilih, sehingga jalannya momentum-momentum pemilihan cenderung mengedepankan sentimen ketimbang argumen. Jika politik identitas terus dibiarkan tumbuh subur maka akan berpotensi melahirkan fasisme, separatisme, dan lain sebagainya. Guna mencegah hal yang sama terjadi pada Pemilu 2024 mendatang, maka diperlukan upaya mitigasi berupa penguatan moderasi beragama, mengedepankan etika politik dan gagasan dari para kandidat, serta peningkatan literasi digital bagi pemilih, sehingga nisca akan menciptakan proses dan hasil Pemilu yang berkualitas.

Kata Kunci : Politik Identitas, Politik Indonesia, Mitigasi, Pemilu 2024

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang bersifat majemuk, yang memiliki keanekaragaman mulai dari suku, agama, etnis, ras, dan budaya. Keanekaragaman inilah yang mengharuskan setiap individu dapat beradaptasi antara satu dengan lainnya. Namun, keanekaragaman ini menimbulkan potensi konflik yang erat kaitannya dengan identitas suku agama, ras, dan antar-golongan (SARA), sehingga dengan mudahnya beberapa individu maupun masyarakat bisa terpengaruh denggan terjadinya hal tersebut. Konflik-konflik yang kerap terjadi di masyarakat ini terjadi bukan tanpa sebab, konflik-konflik ini disebabkan karena suatu kelompok mengekspolitasi identitas dengan tujuan yang salah satunya demi mencapai sebuah kepentingan politik tertentu (Tutukansa, 2022).

Ada suatu pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada hal yang lebih menakutkan ketimbang perpecahan di dalam internal bangsa, yang disebabkan oleh penggunaan strategi emosi atas politik identitas yang berbasis SARA atau bahkan masalah-masalah ekonomi guna mendapatkan dukungan politis. Masyarakat yang majemuk mendapatkan tantangan untuk mencegah kompetisi berbasis sentimen mengenai kedaerahan, primordialisme, dan nafsu atas kuasa maupun sumber daya. Walaupun secara faktual dalam praktiknya antara politik dengan politik identitas seolah menyatu dalam satu tarikan nafas, di mana terjadi momentum-momentum politik, maka di situ ada eksploitasi identitas. Sehingga tantangan berikutnya adalah bagaimana agar bisa membangun suasana damai yang mampu menopang keberagaman dari bangsa (Rozi, 2019)

Bahaya akan politik identitas sebenarnya sudah disadari sejak masa kolonial. Rezim kolonial sangat getol dalam mendoktrin ajaran nasionalisme, hal tersebut dimaksudkan agar konflik-konflik yang disebabkan karena multi-identitas tidak terjadi. Selain menggunakan doktrin nasionalisme, rezim kolonial juga menggunakan cara-cara represiv dan otoriter. Kendati konflik-konflik identitas berhasil diredam, hal tersebut berdampak pada pergeseran populasi rasial berbasis identitas tertentu menjadi populasi nasional serta gilirannya berakibat pada nilai-nilai lokal (*local wisdom*) yang mengalami degradasi.

Pada masa pasca-kemerdekaan, konflik-konflik identitas semakin tidak terdengar keberadaannya. Tahun 1950-an, isu-isu identitas sebenarnya masih menjadi bahan kajian yang menarik, namun isu yang lebih dominan yang mendapat perhatian adalah mengenai partai politik, politik aliran, dan pembangunan bangsa. Politik aliran sendiri sebenarnya diawali dari munculnya politik identitas, politik aliran dipopulerkan oleh seseorang bernama Clifford Geertz pada tahun 1983. Dirinya melihat bahwa masyarakat jawa telah terjadi polarisasi sehingga terbagi menjadi tiga golongan, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Terpolarisasinya identitas masyarakat jawa ini menyebabkan sentimen komunal berbasis kepercayaan dan agama. Konflik terjadi karena timbul ketidaksenangan suatu kelompok dengan kelompok lain yang memiliki perbedaan, hal tersebut diperparah dengan adanya stratifikasi sosial dan perjuangan kepentingan politik tertentu (Geertz, 1996).

Kemudian, maraknya politik identitas dimulai sejak dimulainya masa reformasi, yang kala itu terjadi pergeseran dari model rezim yang semula otoritarian-sentarlistis, menjadi rezim demokratis-desentralistis. Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah justru seperti memberikan ruang bagi gerakan politik identitas. Tak sedikit aktor politik lokal dan nasional yang secara sengaja mengeksploitasi hal ini sebagai *power sharing* dan *power framing*, sehingga kedudukan mereka yang awalnya terpinggirkan dari tampuk-tampuk kekuasaan bisa merapat dan ikut menjadi bagian dari kekuasaan (Soenjoto, 2019).

Nampaknya agak sulit bagi para aktor politik jika melepaskan dirinya dari politik identitas. Jika ada aktor maupun partai politik yang berkata bahwa mereka tidak menggunakan politik identitas sebagai alat politik maka hal tersebut dapat dinilai sebagai kemustahilan, karena dalam partai politik saja menjadikan identitas sebagai *power* utamanya. Gutmann menerangkan bahwa "*many political parties are identity groups, calling upon and cultivating shared identities around ideology, class, religion, and ethnicity, among other mutual recognition*" (Abadi dkk., 2023)

Terhadap permasalahan tersebut, penulis dalam penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan mengenai politik identitas, dampaknya pada pengalaman perpolitikan Indonesia pada pengalaman momentum-momentum pemilihan yang lalu, serta memberikan saran konstruktif untuk meminimalisir praktik politik identitas yang memberi potensi berupa dampak negatif secara signifikan jelang Pemilu 2024 mendatang.

2. Metode Penelitian

Dalam ihwal penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif serta teknik dekriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri serta menilai sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-sumber penelitian yang dimaksud didapatkan dari buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas mengenai pengalaman praktik politik identitas di Indonesia. Pengumpulan data dan analisis yang dilakukan selama penelitian dibarengi dengan pengkualifikasian bahan sesuai dengan sub pembahasan yang telah ditentukan oleh penulis.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Politik Identitas Sebagai Suatu Strategi Politik

Politik identitas yang telah mendominasi isu-isu politik dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya merupakan kajian baru dalam studi ilmu politik. Dalam studi filsafat, sebenarnya wacana politik identitas telah lama muncul, namun pengaplikasiannya dalam studi ilmu politik baru dilakukan setelah adanya simposium dalam sebuah pertemuan Asosiasi Ilmuan Politik Internasional yang bertempat di Wina pada tahun 1994 (Ardipandanto, 2020). Politik identitas sendiri merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang diadopsi oleh komunitas-komunitas di dalam masyarakat yang pada akhirnya membangun sebuah kekuatan politik. Politik identitas juga dapat dipahami sebagai suatu strategi dan refleksi pertalian simbol kultural primordial (kelompok, suku, ras, dan agama) guna memperjuangkan cita-cita kolektif. Menurut Agnes Heller, politik identitas dapat dipahami sebagai suatu strategi politik yang bertendensi pada diferensiasi dan pemanfaatan pertalian primordial sebagai basis kategori utamanya (Rozi, 2019). Politik identitas bisa bermakna positif maupun negatif. Bermakna positif ketika melahirkan toleransi dan kebebasan, bermakna negatif ketika memunculkan nilai-nilai intoleransi, kekerasan, dan juga disparsitas etknik (dominasi mayoritas atas minoritas) (Josep, 2019).

Pada mulanya, politik identitas lahir sebagai upaya perlawanan terhadap perlakuan yang diskriminatif, represif, dan eksploitatif yang ditujukan kepada kelompok mayoritas. Politik identitas dipilih sebagai jalan perjuangan kelompok minoritas untuk meraih hak-haknya kembali dalam suatu komunitas masyarakat. Menguatnya politik identitas disebabkan oleh banyak faktor. Mayoritas pakar beranggapan bahwa menguatnya nilai-nilai "primordial" disebabkan karena derasnya arus globalisasi yang kemudian memberi ancaman bagi keberagaman. Globalisasi menghendaki adanya sebuah penyeragaman, baik itu dari cara pandang, perilaku, maupun sikap yang sejatinya beragam. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, globalisasi bukanlah alasan tunggal dan bahkan tidak selalu identik dengan politik identitas. Hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya banyak faktor yang mendorong praktik politik identitas, seperti keamanan, kekuasaan, sejarah, maupun berbagai faktor yang menciptakan ekslusivitas kelompok. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi basis argumen sebagian kelompok untuk tetap getol mempertahankan politik identitas dengan gayanya masing-masing (Ahmad, 2021).

Dalam konteks politik global, sejarah panjang telah mecatat betapa kejamnya permainan politik yang dilakukan oleh Nazi di bawah kendali Hitler yang kala itu menguasai Jerman (Al-Farisi, 2018). Hitler yang kala itu memenangkan Pemilu tahun 1932 memainkan startegi politik identitas dengan mensuperioritaskan bangsa Arya dan mendiskriminasi bangsa Yahudi. Narasi yang dijual kala itu kepada rakyat Jerman adalah bahwa terjadinya krisis ekonomi dan kekalahan perang dunia yang dialami Jerman disebabkan karena pengaruh bangsa Yahudi, sehingga terjadilah peristiwa genosida terhadap bangsa Yahudi, peritiwa tersebut sekaligus tercatat sebagai peristiwa genosida terburuk sepanjang sejarah (Zahrotunnimah, 2020).

B. Dampak Praktik Politik Identitas Pada Kontestasi Politik Indonesia

Jika menengok ke Tanah Air, politik identitas sendiri digaungkan oleh kelompok *mainstream*, isu-isu yang diangkat adalah seputar agama, etnis, ideologi, dan kepentingan kelompok tertentu. Kelompok agama mayoritas berupaya "meminggirkan" kelompok minoritas yang mereka nilai menyimpang atau menyeleweng dari ajaran mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, hal tersebut juga dipraktikan bukan hanya oleh kelompok tertentu saja, tapi juga negara. Represifitas terhadap kelompok Ahmadiyah sejak tahun 2006 hingga memaksa mereka untuk mengungsi ke Lombok, Nusa Tenggara Timur, serta dibuinya Lia Aminudin, Yusman Roy, dan Ahmad Mussadeq juga merupakan contoh nyata mengenai hal tersebut (Maarif, 2010).

Beberapa tahun setelahnya, pola politik identitas masih sama, yakni politik identitas berbasis agama. Sentimen agama sangat mudah disentuh karena cepat direspon dan mudah dalam memobilisiasi massa, sehingga desain situasi politik yang diingkan akan mudah terbentuk. Politik identitas dinilai sebagai strategi mutakhir guna meraih kekuasaan atas nama kepentingan agama. Sehingga mayoritas masyarakat yang masih minim pemahaman mengenai politk akan mudah terpengaruh dengan narasi semacam ini (Rahman, 2020). Fenomena tersebut menegaskan bahwa agama masih menjadi hal menarik yang kemudian dijadikan sebagai "dagangan politik", yang mampu meraih simpati dari masyarakat. Fenomena yang demikian sudah mewabah secara akut dalam setiap momentum-momentum pemilihan dan seolah sudah menjadi hal yang lumrah. Tak heran jika para kandidat-kandidat maupun pendukungnya lebih bertendensi untuk memobilisasi calon pemilih, terutama pemilih dengan agama yang sama (Ruslan, 2014).

Hal tersebut bisa dilihat dari fenomena-fenomena beberapa tahun yang lalu, politik identitas masif dipraktikan pada momentum-momentum pemilihan, seperti pada Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Ketiga momentum tersebut merupakan potret betapa mengerikannya politik identitas berbasis agama yang dijadikan sebagai strategi politik yang juga pada gilirannya memberikan pengaruh psikologi terhadap pemilih (Nasrudin & Nurdin, 2019)

1. Pilpres 2014

Kala itu, masing-masing dari kubu pendukung calon presiden saling membentuk poros untuk menghantam kubu lain dengan menggunakan identitas yang yang melekat pada diri kandidat. Polarisasi akut yang terjadi antar-kandidat yakni Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK kala itu dapat dibaca sebagai politik identitas yang berbasis agama. Mayoritas partai-partai yang berbasis ideologi Islam seperti PKS, PAN, dan PPP (kubu Djan Faridz) memberikan dukungan pada kubu Prabowo-Hatta. Sementara partai yang berbasis ideologi Islam seperti PKB dan PPP (kubu Romahumurzy) memberikan dukungan pada Jokowi-JK, tak hanya itu, kubu Jokowi-JK juga didukung partai dengan basis nasionalis-sekuler, yaitu PDIP, yang pada gilirannya memperkarya warna jalannya Pilpres kala itu (Ganjar Herdiansyah, 2017).

Bebarapa tuduhan sempat disematkan kepada Jokowi, dirinya disebut sebagai seorang non-pribumi, pemeluk agama minoritas, hingga disebut sebagai seseorang yang berlatar belakang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut sempat diisukan didesain sedemikian rupa oleh seseorang yang memahami perilaku pemilih, yakni seorang konsultan politik asing. Kemudian, beberapa tuduhan yang disematkan kepada Prabowo adalah bahwa dirinya dituding sebagai psikopat, memiliki kewarganegaraan ganda, dan lain sebagainya (Ardipandanto, 2020). Kendati berbagai macam tuduhan disematkan kepada Jokowi, namun pada akhirnya kubu Jokowi-JK dapat memenangkan Pilpres.

2. Pilkada DKI Jakarta 2018

Bergulirnya peristiwa yang dinilai sebagai "penistaan agama" yang merupakan buntut dari pidato Ahok dengan mengutip surah al-Maidah ayat 51 menjadi titik awal maraknya politik identitas. Hal tersebut kemudian memantik amarah dari umat Islam yang kemudian ormas Islam dari berbagai daerah mendatangi Jakarta guna melakukan aksi demonstrasi (Wati, 2021). Media kala itu berperan besar dalam menyumbang *framing*, sehingga massa yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mudah dimobilisasi dengan mengatasnamakan gerakan bela Islam. Tak berhenti di situ, masjid-masjid yang seharusnya terbebas dari agenda politik praktis justru dijadikan tempat kampanye. Ahok yang berasal dari kalangan minoritas juga menjadi salah satu alasan menguatnya politik identitas, yang kemudian memantik narasi "Saya adalah Muslim, maka saya juga memilih pemimpin Muslim." Sikap saling membenci dari dua penganut agamapun tak dapat terelakan, kendati hal tersebut tidak terjadi seluruh penganut. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kekalahan Ahok dalam kontestasi Pilkada (Lestari, 2019).

Akhirnya Anies-Sandi yang kala itu menjadi lawan Ahok-Djarot dalam Pilkada didaulat menjadi pemenang. Andil besar yang juga dilakukan oleh massa 212 memang tidak dapat dinafikan, politik identitas yang terjadi pada waktu itu bisa dikatakan mencapai ke titik kulminasi. Bisa kita pahami bahwa kapasitas, integritas, dan kualitas dari Ahok dalam memimpin Jakarta pada peridoe sebelumnya dapat mudah diruntuhkah ketika dibenturkan dengan politik identitas (Herianto & Wijanarko, 2022). Seorang peneliti dari LIPI, Amin Mudzakir, menyampaikan bahwa masifnya penggunaan politik identitas dibuktikan dari survei yang dilakukan Pollmark, dimana 21,6% responden memilih kandidat karena agamanya, sedangkan 16,3% memilih karena kinerjanya (Wardah, 2017). Penggunaan sentimen agama pada waktu itu benar-benar memberi keuntungan untuk para penunggangnya.

3. Pilpres 2019

Pasca Pilgub DKI Jakarta 2017, politik identitas semakin masif dipraktikan, kondisi tersebut berlanjut hingga Pilpres 2019. Dari kalangan elit, politik identitas cukup memberi pengaruh, hal tersebut merupakan dampak dari Pilkada DKI Jakarta dan aksi massa 212. Dua hal tersebut mempengaruhi gestur dan keputusan dari partai politik dan juga calon presiden. Dari kubu Jokowi, pembatalan pasangan calon yang semula Jokowi-Mahfud MD kemudian diganti menjadi Jokowi-Ma'ruf. Hal tersebut menunjukan bahwa telah terjadi sebuah manuver politik dengan tujuan meraih mayoritas suara dari kalangan muslim. Sementara dari kubu Prabowo bertendensi pada pemenuhan kebutuhan elit politik muslim dalam rangka menentukan cawapres. Elit yang dimaksud adalah elit yang tergabung dalam ijtima' ulama GNPF MUI yang sempat diselenggarakan dua kali (Fernandes, 2020)

Dari kalangan pemilih, bergulir narasi dikotomi Poros Mekkah dengan Poros Beijing. Istilah Poros Mekkah dan Beijing memiliki makna dan stigma yang amat diskriminatif. Istilah Poros Mekkah merepresentasikan kubu yang Islamis, religius, dan kaya akan visi perubahan. Sedangkan Istilah Poros Beijing merupakan stigma sentimen anti "China" terhadap massa pendukung Jokowi yang dianggap dekat dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Muhamad Idrus (Sekjen Sekber) dalam suatu kesempatan menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa poros Mekkah merupakan poros yang bertendensi pada agenda umat dan tidak akan mengkriminalisasi agama (Fadhil, 2018).

Dari segi elektoral, pergerakan pemilih dalam aksi 212 tidak begitu memberi pengaruh signifikan terhadap suara pemilih. Lemahnya dampak massa aksi 212 terhadap politik nasional disebabkan karena dua hal. *Pertama*, tidak adanya pengaruh langsung aksi 212 terhadap eskalasi ataupun fluktuasi pada suara masing-masing pasangan calon. Seandainya politik identitas bekerja, Jokowi yang intens mendapatkan serangan identitas seharusnya mengalami fluktuasi suara. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, suara Jokowi-Ma'ruf justru mengalami eskalasi suara. Begitupun dengan Prabowo-Sandi yang mempunyai basis massa aksi 212 juga tidak meraih eskalasi suara, bahkan justru cenderung mengalami stagnasi (Wingarta dkk., 2021).

Kedua, partai-partai yang mempunyai kedekatan dengan massa 212 tidak mendapatkan insentif politik yang berarti pasca-Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari persebaran pendukung massa 212 ke berbagai partai yang memiliki perbedaan ideologi, baik nasionalis maupun agama. Begitupun dengan partai politik yang memberi dukungan kepada Ahok atau calon lain, sama-sama mendapatkan dukungan suara dari massa 212. Jika dikalkulasikan, Partai Gerindra dipilih sebanyak 22,4% massa 212 dan PDI-P 16,6%, kemudian disusul Partai Golkar 10,8% (Fernandes, 2020)

Menjelang Pemilu 2024, pada Senin, 13 Februari 2023, Partai Ummat pada rakernas perdananya menyampaikan bahwa Partai Ummat akan membawa politik identitas. "Partai Ummat akan melawan narasi politik yang hampa sekaligus menyesatkan dengan sebuah cara yang elegan, yakni dengan politik identitas", ujar Ridho Rahmadi. Hal tersebut pun kemudian mendapat respon oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, ia menyatakan bahwa Bawaslu akan memberi teguran keras kepada partai yang membawa gagasan politik identitas (Deticom, 2023).

C. Mitigasi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Munculnya politik identitas sebagai suatu strategi politik seperti pada pengalaman pemilihan yang lalu menandakan bahwa dalam suatu kontetasi politik belumlah mencapai nilai demokrasi yang substantif. Demokrasi yang tercipta hanyalah bersifat "eksklusif " dan "transaksional". Selain pluralitas yang ada di Indonesia, beberapa faktor lain juga menumbuh suburkan praktik politik identitas, seperti tidak independennya media massa, maraknya buzzer, pemilih yang mudah termakan hoax, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya nasionalisme, dan lain sebagainya (Wingarta dkk., 2021)

Kendati politik identitas sempat gagal dalam upaya meraih suara, namun jika dibiarkan tumbuh subur maka berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih serius, seperti fasisme, separatisme, dan termobilisasinya masyarakat yang telah terafiliasi oleh identitas tertentu. Politik identitas yang selalu digaungkan oleh kelompok tertentu akan memunculkan mono-identitas yang tentu bertentangan dengan realitas-empiris dari masyarakat Indonesia (Nasrudin & Nurdin, 2019). Kekhawatiran Ketua Bawaslu terkait Partai Ummat yang menyatakan bahwa mereka akan membawa gagasan politik identitas tentu bisa dipahami sebagai kekhawatiran akan terulangnya kembali pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi.

Momentum-momentum pemilihan yang lalu agaknya menjadi bahan renungan untuk kemudian bisa mewudkan Pemilu yang berkualitas (Rauta, 2014). Apalagi pasca momentum pertemuan supranasional yang dilaksanakan belum lama ini ini (G20) akan memunculkan potensi narasi seperti komunis, imperial Barat, anti-Islam, dan sejenisnya. Narasi yang demikian tentu akan berpotensi mengulang pengalaman pemilu sebelumnya dengan menyebabkan polarisasi sesuai dengan preferensi kepentingan masing-masing (Sujito, 2022). Identitas yang melekat pada aspek politik sejatinya tidaklah mengandung persoalan, karena hal tersebut merupakan bagian dari realita yang tidak bisa dinafikkan. Yang menjadi persoalan adalah ketika identitas dimanipulasi sebagai strategi picik dalam berpolitik untuk kemudian dibenturkan dengan identitas lawan. Maka pada gilirannya perlu dilakukan konkretisasi tindakan berupa mitigasi terhadap politik identitas pada pemilu 2024 mendatang, yaitu:

1. Moderasi Beragama

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau yang akrab dipanggil Gus Yahya mengingatkan pengalaman buruk politik identitas yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019 (Tunggul, 2023). Multi-identitas yang pada gilirannya akan melanggeng kontestasi politik antar-kelompok (khususnya kelompok agama) dalam upaya meraih dukungan dari ummat seringkali tidak berpijak pada sikap toleransi. Sebagian kelompok berupaya untuk meraih kemenangan dengan memakai simbol-simbol agama dengan mendiskreditkan kelompok lain, baik antar-sesama pemeluk, ataupun terhadap agama, suku, dan ras lain (Akhmadi, 2019).

Pemahaman mengenai agama tidak melulu soal pengamalan agama yang dianut oleh masing-masing individu, tapi juga terkait penghormatan terhadap penganut agama lain, hal tersebut dapat ditekankan dengan diselenggarakannya agenda-agenda yang mengangkat tema seputar moderasi beragama. Hal yang dimaksud diupayakan sebagai jalan tengah dalam beragama agar terhindar dari ideologi ekstrimisme dan fanatisme yang berlebihan. Moderasi atau moderat menurut bahasa Arab dipahami sebagai *al-wasathiyah* (QS. al-

Baqarah (2) : 143) memiliki makna jalan tengah, paling baik, dan paling sempurna, sehingga dapat didesain menjadi alternatif-solutif untuk merespon multi-identitas yang termasuk di dalamnya mengenai identitas agama. Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi serta kerukan, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global (Akhmadi, 2019).

Dalam merespon segala persoalan politik yang berbasis agama, konsep moderasi dilakukan sebagai langkah kompromi untuk menyelesaikan ketegangan antar-kubu yang berselisih, apalagi mengingat polarisasi antar-umat beragama pada pengalaman kontestasi politik yang lalu disebabkan hanya karena perbedaan pandangan politik. Perbedaan pandangan dalam sebuah kontestasi politik merupakan keniscayaan, kendati hal tersebut sering memantik konflik. Sehingga konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan tersebut diperlukan jalan penyelesaian terbaik dan sempurna, yakni melalui ajaran moderasi dalam berpolitik. Kiat-kiat yang dapat dilakukan antara lain seperti mengadakan sosialisasi dan *focus gorup discussion* (FGD) yang diikuti oleh peserta dan pemilih, hal tersebut dapat diinisiasi baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain dengan mengangkat tema seputar penguatan moderasi beragama jelang Pemilu 2024.

2. Mengedepankan Etika Politik dan Gagasan

Sudah menjadi hal yang wajar apabila para kandidat dan para pendukungnya menggembor-gemborkan isu-isu strategis dan juga menjanjikan program-program dalam masa kampanyenya. Namun pengalaman pemilihan-pemilihan yang lalu sangat mudah dipahami bahwa kampanye yang terjadi justru beratensi dan bertendensi pada propaganda kampanye hitam (*black campaign*), sehingga sangat menganulir nilai demokrasi yang subtantif dan kering akan gagasan.

Pemilu 2024 mendatang tentu tidak bisa dianggap sebagai agenda rutin belaka, apalagi mengingat penyelenggaraanya akan dilakukan secara serentak. Sejatinya terdapat harapan besar dari seluruh elemen akan perubahan besar untuk bangsa dan negara setelahnya. Hal tersebut tentu harus diawali dengan pembenahan pada para kandidat dan para pendukungnya, yakni harus lebih mengedepankan etika serta gagasan ketimbang sentimen belaka untuk bisa meraih dominasi dari suara pemilih. Etika dalam berpolitik dapat menjadi jalan pendidikan politik dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Surajiyo, etika politik memiliki peran sentral dalam memberi pakem orientasi dan pijakan normatif agar dapat melahirkan keputusan politik yang berbasis moral. Kemudian menurut Magnis Suseno, etika politik akan menuntun pada pengejawantahan harkat dan martabat manusia (Oktaviani, 2016). Sehingga narasi-narasi yang timbul selama kampanye tidak lagi bernuansa SARA seperti pada pengalaman pemilihan yang lalu.

Begitu pula dengan gagasan, para kandidat harus masif menawarkan gagasan-gagasan melalui safari politik maupun forum-forum debat terbuka, dengan memberi gagasan mengenai program-program yang berpotensi meraih perubahan dan kemajuan, seperti halnya pemberantasan korupsi, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, dan lain sebagainya (Fatimah, 2018). Hal tersebut juga harus disokong dari parpol pengusung, mengingat turunnya tingkat kepercayaan pemilih pada institusi demokrasi tentu tidak tidak bisa diabaikan begitu saja. Ideologi dari masing-masing parpol harus direfleksikan dalam setiap masa kampanye, sehingga stigma negatif terhadap parpol dapat segera diredam. Komitmen terbut harus dijaga bersama-sama dan konkret dalam pelaksanaannya. Hal ini juga sangat penting untuk menghalau kelompok *mainsteram* yang berusaha menunggangi partai politik yang mempunyai kepentingan lain (Santoso, 2019).

3. Meningkatkan Literasi Digital

Kendati setiap hari selalu marak pemberitaan soal politik, tapi nyatanya belum menjadikan masyarakat paham mengenai esensi Pemilu yang ideal. Hadirnya platform media sosial sebagai sumber percepatan informasi memiliki potensi yang besar dalam memunculkan *framing* kebencian, disinformasi, hoax, dan lain-lain. Polarisasi yang disebabkan karena media sosial akan selalu menjadi tantangan terbesar dalam setiap momentum-momentum pemilihan. Maka dari itu, perlu diciptakan sebuah ekosistem digital yang ideal, yaitu literasi digital. Guna mengeskalasi literasi digital, maka diperlukan mekanisme pemberantasan konten yang digunakan sebagai percepatan informasi.

Khoirunnisa mengatakan bahwa hal terpenting dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang adalah mengenai partisipasi pemilih yang diharapkan cerdas dan mampu memfilter informasi saat masa kampanye berlangsung. Harus secara jeli memahami dan mengenalis makna dibalik narasi-narasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan sentimen antar-pemilih. Melalui media, masyarakat juga hatus turut andil dalam menilai mengenai rasionalitas dan validitas gagasan yang diusung oleh kandidat. Hal yang dimaksud tentu menjadi penuntun bagi pemilih sebagai yang merupakan sasaran kampanye agar tidak terpengaruh oleh mobilisasi politik identitas yang berpotensi bangkit kembali, sehingga akan tercipta iklim politik yang sehat dalam momentum Pemilu 2024 mendatang (Nugroho, 2023).

4. Kesimpulan

Praktik politik identitas telah melalui masa yang panjang dalam kontetasi politik Indonesia. Sejak rezim kolonial, bahaya akan politik identitas sudah disadari dan sempat dilakukan upaya preventif. Namun pada era reformasi politik identitas mulai masif digaungkan. Beberapa tahun setelahnya, politik identitas masif dipraktikan pada momentum-momentum pemilihan: Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Pemilu yang idealnya merupakan arena untuk mengadu gagasan dari para kandidat guna kemajuan bangsa, namun justru kentara akan politik identitas berbasis agama. Akibat dari hal tersebut sangat dirasa, seperti terjadinya polarisasi antar-pemilih, seperti pada momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 menimbulkan polarisasi siginifikan; satu kubu menghantam Ahok, kubu lain membela Ahok. Tentu hal tersebut menjadi suatu catatan buruk bagi sejarah politik Indonesia.

Dalam ikhtiar untuk memitigasi hal yang serupa agar tidak terjadi, maka diperlukan doktrin-doktrin paham moderat melalu agenda-agenda yang bertemakan moderasi beragama, pemberian pemahaman bagi para kandidat agar lebih mengedepankan gagasan, dan peningkatan literasi digital bagi pemilih agak terhindar dari hoax dan narasi-narasi provokatif. Sehingga penyelanggaraan dan *output* dari Pemilu 2024 dapat mencerminkan Pemilu yang lebih demokratis secara substantif dan dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas, yang mampu membawa perubahan signifikan bagi bangsa dan negara.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih peneliti haturkan kepada Program Studi Ilmu Politik FISIP USU yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk bisa menorehkan hasil konkretisasi berpikir terkait dengan politik identitas di Indonesia.

Daftar Pustaka :

Abadi, M., Alung, C., Permadi, I., & Schova, Y. (2023). *Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu*. *4* (2).

Ahmad, J. (2021). *Ilmu Politik Praktis: Dari Teori Ke Implementasi*. Akademia Publishing.

Akhmadi, A. (2019). *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity*. *13*(2).

Al-Farisi, L. S. (2018). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila. *Jurnas; Aspirasi*, *2*.

Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact Of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *11*(1), 43–63. Https://Doi.Org/10.22212/Jp.V11i1.1582

Bachtiar, F. R. (2014). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*. *3*.

Detikcom, Tim (2023, February 21). Partai Ummat 'Kami Politik Identitas' Bikin Bawaslu Beri Protes Keras. *Detiknews*. https://news.detik.com/pemilu/d- 6579919/partai-ummat-kami- politik-identitas-bikin-bawaslu-beri-protes keras/amp.

Fernandes, A. (T.T.). *Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi Dan Efektivitas*.

Ganjar Herdiansyah, A. (2017). Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, *3*(2).

Geertz, C. (1996). *The Religion Of Java* (Nachdr.). Univ. Of Chicago Press.

Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *5*(1), 53–64. Https://Doi.Org/10.23887/Jfi.V5i1.39581

Huda, U. N. (2018). *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Cetakan Pertama). Fokusmedia.

Josep. (2019). *Dinamika Politik Identitas Di Indonesia*. Indocampd.

Lestari, D. (2019). *Pilkada Dki Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia*. *2*.

Maarif, A. S. (2010). *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Cet. 1). Pusat Studi Agama Dan Demokrasi : Yayasan Wakaf Paramadina.

Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada Dki Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, *1*(1), 34–47. Https://Doi.Org/10.15575/Hanifiya.V1i1.4260

Nugroho, Agung. (2023, May 20). CfDS dan Perludem Bahas Peranan Teknologi Digital dalam Pemilu 2024. *Liputan Berita Universitas Gadjah Mada*. https://ugm.ac.id/berita/23576- cfds-danperludem-bahas- peranan=teknologi- digital-dalam-pemilu-2024/.

Prasetyo, T. (2019). *Pemilu Dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat* (Cetakan 1). Nusamedia.

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, & Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, *14*(1). Https://Doi.Org/10.20885/Khazanah.Vol14.Iss1.Art3

Rozi, S. (Ed.). (2019). *Politik Identitas: Problematika Dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua* (Cetakan Pertama). Bumi Aksara.

Ruslan, I. (2014). *Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik*. *2*.

Santoso, E. P. B. (2019). Pemilu Dan Pilkada Dalam Pusaran Politik Identitas. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. Https://Doi.Org/10.32699/Resolusi.V2i2.1036

Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia Di Era 4.0. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, *4*(2), 187–217. Https://Doi.Org/10.21580/Jish.42.5223

Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *17*(2), 355. Https://Doi.Org/10.31078/Jk1726

Sujito, D. A. (2022). Pancasila Dan Politik Emansipasi:Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila*, 3(2), 13.

Tunggul. (2023, August 4). Gus Yahya: Pemilu 2014 dan 2019 Pengalaman Buruk Politik Identitas. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230804203916-982197/gus-yahya-pemilu-2014-2019-pengalaman-buruk-politik-identitas.

Wardah, Fathiya. (2017, March, 30). Politik Identitas Kental Warnai Pemilihan Gubernur Jakarta. *Voaindonesia*. https://voaindonesia.com/amp/politik-identitas-kental-warnai-pemilihan-gubernur-jakarta/3788454.html.

Wati, W. (2021). Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis. *Jurnal Pendidikan Pkn (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *2*(2), 66. Https://Doi.Org/10.26418/Jppkn.V2i2.44627

Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (T.T.). *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia*.

Zahrotunnimah, Z. (2020). Keniscayaan Politik Identitas Dari Suatu Bangsa Dan Agama. *'Adalah*, *4*(2). Https://Doi.Org/10.15408/Adalah.V4i2.15529